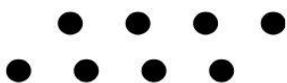


BORCELLE

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

KECAMATAN NUHA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan III Kecamatan Nuha ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan selama periode triwulan yang bersangkutan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, pelaksanaan program, serta kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung tercapainya visi serta misi pemerintah daerah. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini, baik dari unsur pemerintah, lembaga masyarakat, maupun seluruh staf kecamatan Nuha yang telah bekerja dengan penuh dedikasi.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja aparatur kecamatan Nuha serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sorowako, Oktober 2025

Camat Nuha,



**ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom, M.Si.**

Pangkat : Pembina

NIP. 19810204 200902 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1. LATAR BELAKANG.....	4
2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI .....	4
2.1. KONDISI GEOGRAFIS .....	4
2.2. STRUKTUR ORGANISASI .....	5
2.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	6
2.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	9
2.5. ISU STRATEGIS.....	13
2.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	14
<b>BAB II.....</b>	<b>16</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	16
2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH .....	16
2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	18
2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	20
2.2. PERJANJIAN KINERJA .....	21
2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025.....	22
<b>BAB III.....</b>	<b>23</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	23
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi .....	27
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun lalu Dan Beberapa Tahun terakhir .....	28

C.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra .....	30
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Regional/Nasional.....	32
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	37
G.	Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	51
3.2.	REALISASI ANGGARAN .....	55
BAB IV	.....	60
PENUTUP	.....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

### **2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI**

#### **2.1. KONDISI GEOGRAFIS**

Kecamatan Nuha merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270). Luas wilayah 859,71 Km<sup>2</sup> atau 12,74% Luasan tersebut membawa kecamatan Nuha sebagai kecamatan terluas kelima dari sebelas kecamatan yang ada di Luwu Timur. Di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Towuti.. Kecamatan Nuha terdiri dari 4 (Empat) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yaitu:

1. Desa Matano
2. Desa Sorowako

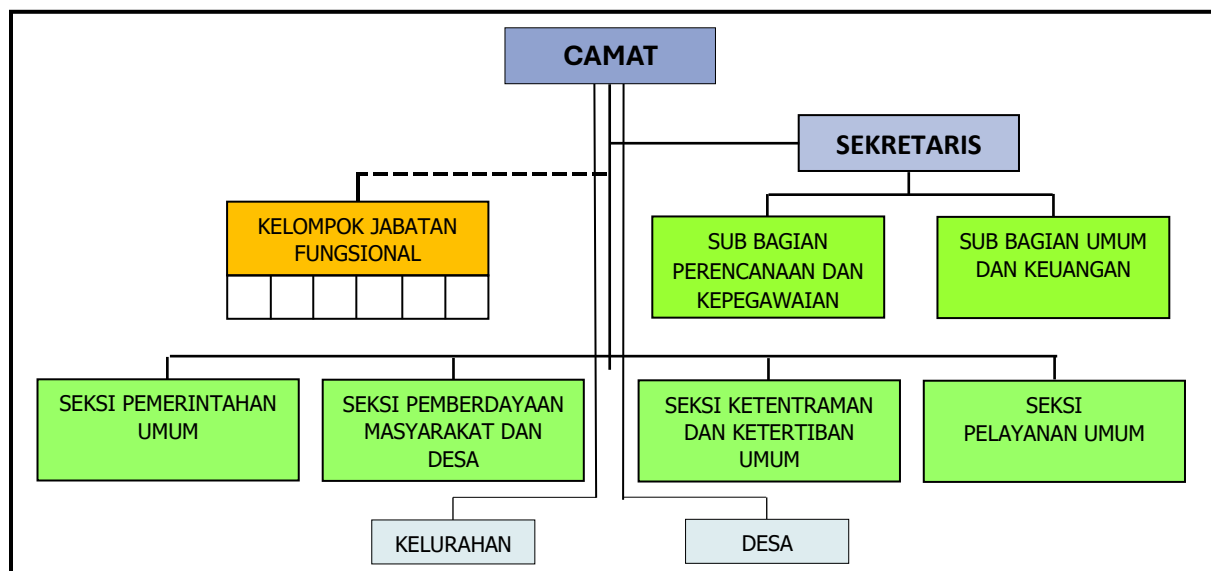
2. Desa Nuha
3. Desa Nikkel
4. Kelurahan Magani

## 2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Kecamatan Nuha ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan/ Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut:

**Gambar 1.1.**  
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Nuha



## 2.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### 1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan

- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas.

## **2. Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### **2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2. Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;



- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Pemerintahan Umum**

Seksi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

### **2.4.1. Aspek Eksternal**

Aspek eksternal yang mendukung keberhasilan antara lain:

1. Dukungan pemerintah ditingkat lebih tinggi:  
Pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan, regulasi, serta alokasi sumber daya yang mendukung pemerintahan di tingkat kecamatan diantaranya kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada kecamatan untuk mengelola urusan lokal.
2. Kondisi Sosial dan Budaya:

Penduduk Kecamatan Nuha terdiri dari berbagai suku dan agama. Dari kemajemukan tersebut menciptakan kondisi sosial dan budaya yang harmonis.

3. Stabilitas Keamanan:

Stabilitas keamanan memberikan iklim yang kondusif bagi pemerintah Kecamatan Nuha untuk bekerja tanpa gangguan konflik atau ketidakstabilan keamanan.

4. Partisipasi Masyarakat:

Keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pemerintahan, seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), sangat berpengaruh. Partisipasi ini mencakup dukungan ide, tenaga, dan sumber daya masyarakat untuk program pemerintah.

#### **2.4.2. Aspek Internal**

Aspek internal yang mendukung terbagi atas 3 komponen yaitu:

##### **1. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Dalam memberikan pelayanan publik, Kecamatan Nuha pada tahun 2024 didukung oleh 12 orang PNS yang terdiri dari:

- a. Eselon III/A sebanyak 1 orang
- b. Eselon III/B sebanyak 1 orang
- c. Eselon IV/A sebanyak 4 orang
- d. Eselon IV/B sebanyak 2 orang
- e. Pelaksana sebanyak 6 orang
- f. PPPK pelaksana sebanyak 4 orang

selain itu, untuk mengatasi kekurangan tenaga PNS, Kantor Kecamatan Nuha juga didukung oleh 2 orang tenaga upah jasa.

Berikut data PNS dan upah jasa pada Kantor Kecamatan Nuha tahun 2025:

##### **A. Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.**

**Tabel I.1.**

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
Kantor Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	Golongan	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Golongan IV	1		1										2	
2	Golongan III		2		7		2								11
3	Golongan II							1	2					1	2
4	Golongan IX				2										2
5	Golongan X								2						2
<b>JUMLAH</b>														<b>3</b>	<b>17</b>

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Nuha 2025

Tabel I.1. di atas, menunjukkan bahwa jumlah PNS pada Kecamatan Nuha sebanyak 16 orang, PPPK sebanyak 4 Orang yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Nuha sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini:

**B. Jumlah pejabat Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.**

Komposisi pejabat struktural pada Kantor Kecamatan Nuha tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.2.**

Jumlah Pejabat Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	ESELON	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	III/A	1												1	0
2	III/B			1										1	0

3	IV/A				6								6	
4	IV/B			2								2	0	
JUMLAH													6	2

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Nuha 2025

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas menunjukkan bahwa jumlah pejabat struktural sebanyak 8 (Delapan) orang yang didominasi oleh perempuan sebanyak 6 (enam) orang, dan laki-laki sebanyak 2 (dua) orang.

**C. Jumlah Tenaga Upah Jasa dan Tenaga Sukarela Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.**

Jumlah Tenaga Upah Jasa pada Kantor Kecamatan Nuha tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.3.**

Jumlah Tenaga Upah Jasa dan Sukarela berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	TENAGA UPAH JASA DAN SUKARELA	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tenaga Upah Jasa				1				1		1				3
<b>JUMLAH</b>															<b>3</b>

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Nuha 2025

**2. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kantor Kecamatan Nuha meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta jaringan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I.4.**

Sarana dan Prasarana Pendukung  
Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
	Kecamatan :		

1.	Rujab	1 Unit	Baik
2.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
3.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
4.	Tanah Bangunan Rujab	7,574 M2	Baik
5.	Tanah Bangunan E-KTP	1,559M2	Baik
6	Mobil	1 unit	Baik
7.	Sepeda motor	2 unit	Baik

Sumber: Sub Bagian Umum dan Keuangan

### 3. Sumber Daya Anggaran:

Sumber Daya Anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kantor Kecamatan Nuha bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

**Tabel I.5.**

Sumber Daya Anggaran

KODE REK	URAIAN	JUMLAH
5.1.	BELANJA OPERASI	Rp.3.932.951.208
5.1.01.	Belanja Pegawai	Rp. 2.766.498.802
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.166.452.406
<b>5.2</b>	BELANJA MODAL	Rp.10.300.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Efisiensi Kecamatan Nuha T.A 2025

## 2.5. ISU STRATEGIS

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Nuha dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan

komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Nuha tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain:

1. Tuntutan masyarakat dalam menerima pelayanan publik yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana yang tercantum didalam Renstra Kecamatan Nuha yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nuha sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Memperhatikan isu-isu permasalahan diatas terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu menghadirkan dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.

## **2.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Nuha tahun 2025 sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan target dan realisasi tahun ini;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar;
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran:**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja ditahun kedepannya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis pada laporan evaluasi kecamatan merupakan panduan utama dalam mengarahkan pembangunan wilayah secara terukur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rencana ini mencakup penetapan visi, misi, serta tujuan jangka menengah dan jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan optimalisasi potensi lokal. Strategi yang disusun meliputi pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kolaborasi antarinstansi dan partisipasi warga. Setiap program dan kegiatan dirancang berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, dengan indikator keberhasilan yang jelas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan kecamatan secara menyeluruh.

Dengan renstra memastikan bahwa sumberdaya dan dana wilayah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui renstra, arah pembangunan Kecamatan Nuha bisa lebih dipahami masyarakat, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab.

Penyusunan renstra Kecamatan Nuha mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 dan dilaksanakan secara partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait. Secara ringkas, renstra Kecamatan Nuha dapat di ilustrasikan sebagai berikut :

##### **2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH**

###### **A. VISI**

Dalam penyelenggaran sistem pemerintahan, penyusunan perencanaan pembangunan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannnya dapat dilakukan dengan sistematis, terpadu, terarah dan sesuai dengan cita-cita yang ingin

diwujudkan. Suatu hal yang mendasar dari setiap perencanaan adalah perumusan visi dan misi, yang merupakan suatu nilai yang ingin dicapai dalam periode tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan kondisi umum masyarakat Kabupaten Luwu Timur saat ini, permasalahan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang dan sesuai dengan cita-cita pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 maka visi Kabupaten Luwu Timur yang ingin diwujudkan adalah :

**“ Luwu Timur Maju dan Sejahtera”**

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut :

- **“Sejahtera”** mengandung makna meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, peningkatan kegembiraan membaca dan literasi, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan, mendukung pengembangan rumah sakit dan layanan kesehatan, mengutamakan perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat dan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana ibadah, memelihara kerukunan umat beragama, dan memelihara situasi kondusif bagi pengamalan nilai dan norma agama dan melestarikan budaya daerah.
- **“maju”** Mengandung makna upaya meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, stabilitas ekonomi, serta memastikan distribusi pertumbuhan yang sejalan antar sektor guna menghindari ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, pemanfaatan koordinasi dan keharmonisan kerja antar stakeholder pembangunan ekonomi daerah dan optimalisasi tugas dan fungsi pengendalian dan pemantauan inflasi daerah; selain itu misi juga mencakup peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan serta memperkuat koperasi dan UMKN, peningkatan daya saing pariwisata, penguatan sistem penyuluhan, pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kedaulatan pangan promosi

peluang investasi pada berbagai sektor usaha potensial di daerah untuk membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas, mengembangkan iklim dan sarana/prasarana pendukung investasi daerah, mendorong transparansi dan mempermudah perizinan serta membuka peluang investasi .

## **B. MISI**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur, maka diupayakan melalui 5 (Lima) Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan;
4. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital.

Misi RPJMD yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nuha Kab. Luwu Timur adalah **Misi Ke-5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital”**, Misi ini mencakup upaya penguatan kelembagaan dan tata-laksana pemerintahan daerah melalui transformasi reformasi birokrasi, penguatan sistem pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan memperbaiki administrasi pemerintahan umum serta mengembangkan kerjasama, multipihak dalam mendorong inovasi dan akselerasi pembangunan daerah.

### **2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan dan sasaran strategis kecamatan disusun sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan

kepada masyarakat di tingkat wilayah. Tujuan strategis berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan potensi lokal untuk mendukung kesejahteraan warga. Sementara itu, sasaran strategis diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan, serta terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan berdaya saing. Melalui tujuan dan sasaran ini, kecamatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayahnya.

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah dapat diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun:

Tujuan dan sasaran Kecamatan Nuha 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.  
Tujuan dan Sasaran Strategis

VISI RPJMD: Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya		
MISI 4: Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Nuha	Meningkatkan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Nuha
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

### 2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat kecamatan merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja pemerintahan di wilayah tersebut. IKU berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui pengukuran yang terarah dan terukur, kecamatan dapat mengevaluasi efektivitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur. Dengan demikian, IKU menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana tujuan dan sasaran memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

**Tabel 2.2.**  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Kalaena	Meningkatkan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada pemerintah kecamatan merupakan dokumen formal yang berisi komitmen antara camat sebagai pimpinan unit kerja dengan pihak yang lebih tinggi, seperti bupati atau wali kota, dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi dasar akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Melalui perjanjian kinerja, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Selain itu, perjanjian ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik kepada mas

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nuha Tahun 2025:

**Tabel 2.3.**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50

<b>2</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP	66
----------	---	-------------	----

### 2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025 yang terdiri dari 6 (enam) Program dengan anggaran sebesar **Rp.3.943.251.208,-** dengan gambaran sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**

Program pada RKA Perubahan Tahun 2025.

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>3.943.251.208</b>
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	4.754.850
<b>III</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>279.571.950</b>
<b>IV</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>13.080.850</b>
<b>V</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>32.623.000</b>
<b>VI</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>8.211.350</b>

Sumber: RKA Kecamatan Nuha Tahun 2025

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Nuha pada periode ini, dapat dilihat dalam tabel berikut:

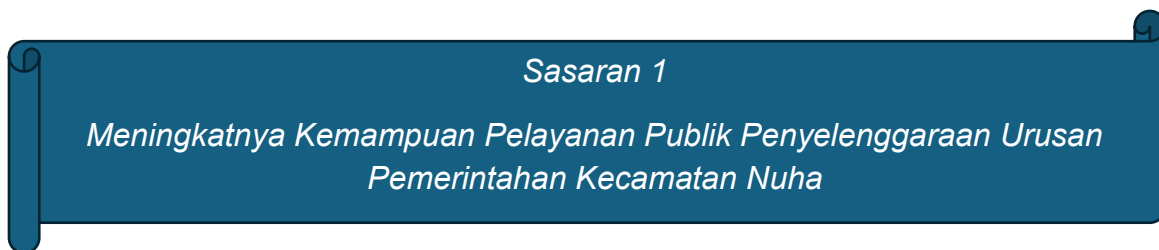


**Tabel. 3.1**

Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja  
Kecamatan Nuha Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50	81,95	99,79
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP	66	Belum rilis	Belum rilis

Berikut akan dijabarkan secara rinci hasil pengukuran kinerja setiap sasaran strategis :



Definisi operasional dari sasaran ini mengacu pada peningkatan kapasitas dan kualitas aparaturnya kecamatan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang diukur melalui **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**.

Meningkatnya kemampuan pelayanan publik berarti adanya perbaikan dalam aspek kompetensi aparatur, efektivitas proses pelayanan, serta kualitas hasil pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Peningkatan ini tercermin dari naiknya nilai IKM yang menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.

Indikator Pengukuran (berdasarkan IKM):

1. Kualitas Pelayanan: Ketepatan, kejelasan, dan kemudahan prosedur pelayanan publik.
2. Kecepatan dan Ketepatan Waktu: Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Kompetensi dan Sikap Petugas: Kemampuan, keramahan, dan tanggung jawab aparatur dalam melayani masyarakat.
4. Keadilan dan Kepastian Layanan: Kesetaraan dalam pemberian layanan tanpa diskriminasi.
5. Sarana dan Prasarana: Ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan yang memadai dan nyaman.

Cara Pengukuran:

Peningkatan kemampuan pelayanan publik diukur melalui perbandingan nilai IKM dari periode sebelumnya dengan periode berjalan. Kenaikan nilai IKM menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan.

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat memberikan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik. Nilai IKM yang tinggi mencerminkan keberhasilan instansi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, sedangkan nilai rendah menjadi sinyal perlunya peningkatan kinerja dan perbaikan sistem pelayanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rumus Perhitungan	X = Y dibagi Nilai Dasar; dimana X = nilai indeks Y = nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) setelah dikonversi

	<p>Nilai Dasar = 25</p> <p>Predikat/kategori capaian IKM yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Interval 88,31-100 Kategori A Predikat Sangat Baik</li> <li>- Nilai Interval 76,61-88,30 Kategori B Predikat Baik</li> <li>- Nilai Interval 65-76,60 kategori C Predikat Kurang Baik</li> <li>- Nilai interval 25-64,99 kategori D Predikat Tidak Baik</li> </ul>
Sumber Data	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Nuha
OPD	Kecamatan Nuha
Penanggungjawab	

Dengan demikian, peningkatan kemampuan pelayanan publik dapat dinyatakan terjadi apabila nilai IKM mengalami kenaikan dan berada pada kategori yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

## Sasaran 2

### *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan*

Defenisi operasional dari sasaran ini adalah kondisi di mana organisasi atau instansi publik menunjukkan peningkatan dalam tanggung jawab, transparansi, dan kejelasan dalam pengelolaan sumber daya serta pencapaian hasil kerja. meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan tercermin dari perbaikan sistem pelaporan, peningkatan transparansi, serta konsistensi dalam pencapaian hasil dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab.

Nama Indikator	<b>Nilai AKIP</b>
Interpretasi	sistem yang digunakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk memastikan bahwa setiap program/kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Rumus Perhitungan	

	<p> <math>\text{Nilai AKIP} = (0,10 \times \text{nilai perencanaan Kinerja}) + (0,15 \times \text{Nilai Pengukuran Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Pelaporan Kinerja}) + (0,10 \times \text{nilai Evaluasi Kinerja}) + (0,55 \times \text{Nilai capaian Kinerja})</math> </p> <p>-</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat Memuaskan (AA) (90-100) : Kinerja sangat akuntabel, penggunaan anggaran sangat efisien dan efektif, fokus pada hasil.</li> <li>- Memuaskan (A) (80-&lt;90) : Akuntabilitas tinggi, program berjalan efektif dan efisien</li> <li>- Baik (BB) (70-&lt;80) : Sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas, namun masih ada ruang perbaikan.</li> <li>- Cukup Baik (B) (60-&lt;70) : Akuntabilitas dasar telah ada, tetapi belum sepenuhnya fokus pada hasil</li> <li>- Kurang Baik (CC) (50-&lt;60) : Masih fokus pada input dan output, belum efektif dalam pencapaian hasil</li> <li>- Buruk (D) (&lt;50) : Rendahnya akuntabilitas, penggunaan anggaran tidak berorientasi hasil</li> </ul>
Sumber Data	Inspektorat Kab. Luwu Timur
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Nuha

### A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Utama dapat) dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.**

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikato Kinerja Utama Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TW III	CAPAIAN PREDIKAT	
Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50	81,95	100,5	Baik

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Akip	66	Belum rilis	Belum rilis	
---	------------	----	-------------	-------------	--

Sumber: Kecamatan Nuha Tahun 2025

#### 1. Sasaran Strategis: Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Nuha

- **Indikator Kinerja:** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- **Target:** 81,50
- **Realisasi TW III:** 81,95
- **Capaian:** 100,5%
- **Predikat:** Baik

##### Penjelasan:

Hasil realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan III tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 81,95, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,50. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Nuha mengalami peningkatan dan telah memenuhi bahkan melebihi ekspektasi yang direncanakan. Dengan capaian 100,5%, kinerja pelayanan publik dapat dikategorikan **baik**, menandakan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan.

#### 2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan

- **Indikator Kinerja:** Nilai Akip
- **Target:** 66
- **Realisasi TW III:** Belum rilis
- **Capaian:** Belum rilis

**Penjelasan:**

Untuk indikator Nilai Akip, hasil realisasi pada Triwulan III tahun 2025 belum dirilis. Oleh karena itu, capaian dan predikat belum dapat ditentukan. Namun, target yang ditetapkan sebesar 66 menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan Nuha. Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan setelah hasil resmi Akip diterbitkan oleh instansi berwenang.

**Kesimpulan:**

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Nuha pada tahun 2025 menunjukkan hasil positif, terutama dalam aspek pelayanan publik yang telah melampaui target. Sementara itu, aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan masih menunggu hasil penilaian resmi untuk dapat dievaluasi lebih lanjut.

**B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun lalu Dan Beberapa Tahun terakhir****Tabel 3.3****Perbandingan realisasi kinerja Tahun Ini dengan tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	2	3	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2021 (TW II)	80,03	99,9%	BAIK
		2022 (TW II)	80,05	98,83%	BAIK
		2023 (TW II)	80,62	98,92%	BAIK
		2024 (TW II)	81,02	99,96%	BAIK
		2025 (TW II)	81,95	100,5%	BAIK

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	2	3	5	6	7
2	Nilai Akip	2021 (TW II)	64,54	102,4%	B
		2022 (TW II)	58,40	91,25%	CC
		2023 (TW II)	62,50	96,16%	B
		2024 (TW II)	64,70	98,04%	B
		2025 (TW II)	Belum rilis	Belum rilis	B

Sumber : Kecamatan Nuha 2025

#### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan data dari tahun 2021 hingga 2025, nilai IKM Kecamatan Nuha menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, nilai IKM tercatat sebesar **80,03** dengan capaian **99,9%** dan predikat **Baik**. Nilai ini terus meningkat hingga mencapai **81,95** pada tahun 2025 dengan capaian **100,5%** dan tetap mempertahankan predikat **Baik**. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kenaikan nilai IKM dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masyarakat semakin puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan. Dengan capaian di atas 100% pada tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa target kinerja pelayanan publik telah terlampaui dan menunjukkan hasil yang sangat positif.

#### 2. Nilai Akip (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Untuk indikator Nilai Akip, capaian kinerja menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai Akip mencapai **64,54** dengan capaian **102,4%** dan predikat **B**, menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik. Namun, pada tahun 2022

terjadi penurunan menjadi **58,40** dengan capaian **91,25%** dan predikat **CC**, yang menandakan adanya penurunan dalam pengelolaan kinerja dan akuntabilitas. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai Akip kembali menunjukkan tren positif dengan peningkatan menjadi **62,50** pada tahun 2023 dan **64,70** pada tahun 2024, keduanya dengan predikat **B**. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dan peningkatan sistem akuntabilitas di lingkungan Kecamatan Nuha. Untuk tahun 2025, hasil penilaian Akip **belum dirilis**, sehingga capaian dan predikat belum dapat dievaluasi secara pasti.

#### **Kesimpulan:**

Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Nuha menunjukkan perkembangan yang baik, terutama dalam aspek pelayanan publik yang terus meningkat dan melampaui target. Sementara itu, akuntabilitas kinerja dan keuangan menunjukkan perbaikan setelah sempat menurun pada tahun 2022. Hasil akhir tahun 2025 akan memberikan gambaran lebih lengkap mengenai efektivitas peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Nuha.

#### **C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap Renstra Kecamatan Kalaena sebagai berikut:

##### **Tabel 3.4.**

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Kecamatan Nuha 2021-2026



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tw III	Target Renstra
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50	81,95	81,50
<b>2</b>	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Akip	66	Belum rilis	67

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kecamatan Nuha tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Sasaran: Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik**

- o **Indikator Kinerja:** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- o **Target Tahun 2025:** 81,50
- o **Realisasi Triwulan III Tahun 2025:** 81,95
- o **Target Akhir Renstra (2026):** 81,50

Capaian IKM pada Triwulan III tahun 2025 sebesar **81,95** menunjukkan hasil yang **melampaui target tahunan (81,50)** dan juga **lebih tinggi dari target akhir Renstra 2026**. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Nuha mengalami peningkatan yang baik dan telah memenuhi bahkan melebihi ekspektasi yang ditetapkan dalam rencana strategis. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

**2. Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

- o **Indikator Kinerja:** Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

- **Target Tahun 2025:** 66
- **Realisasi Triwulan II Tahun 2025:** Belum rilis
- **Target Akhir Renstra (2026):** 67

Untuk indikator nilai AKIP, data realisasi tahun 2025 **belum dirilis**, sehingga belum dapat dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja. Namun, jika mengacu pada tren peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, target akhir Renstra sebesar **67** masih dapat dicapai apabila upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja serta pengelolaan keuangan terus dilakukan secara konsisten.

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Nuha tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, terutama pada aspek pelayanan publik yang telah melampaui target. Sementara itu, untuk aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan, perlu menunggu hasil resmi nilai AKIP untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target Renstra 2026.

#### **D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Regional/Nasional**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, analisis terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana pelayanan pemerintah memenuhi harapan warga. Perbandingan IKM antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten memberikan gambaran menyeluruh mengenai variasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Melalui perbandingan ini, dapat diidentifikasi kecamatan dengan kinerja pelayanan terbaik serta wilayah yang memerlukan peningkatan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan mutu pelayanan publik di tingkat kabupaten.

Berikut tabel perbandingan IKM dengan Kecamatan yang ada dalam wilayah Kab. Luwu Timur:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan realisasi kinerja TW III dengan realisasi regional**

No	Indikator Kinerja	Kecamatan	Realisasi TW III
1	2	3	5
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NUHA	81,95
		TOWUTI	84,50
		WASUPONDA	94,07
2	Nilai AKIP	NUHA	Belum rilis
	(berdasarkan LHE tw II)	TOWUTI	Belum rilis
		WASUPONDA	Belum rilis

Berdasarkan data capaian kinerja Triwulan III tahun 2025, berikut penjelasan perbandingan antara Kecamatan Nuha dan dua kecamatan lainnya di wilayah regional:

**1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

- o Kecamatan **Nuha** mencatat nilai IKM sebesar **81,95**,
- o Kecamatan **Towuti** memperoleh nilai **84,50**,
- o Kecamatan **Wasuponda** mencapai nilai tertinggi yaitu **94,07**.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat di Kecamatan Nuha masih berada di bawah dua kecamatan lainnya. Meskipun demikian, nilai 81,95 tetap menunjukkan kategori **baik**, menandakan pelayanan publik di Kecamatan Nuha telah berjalan dengan cukup efektif. Namun, dibandingkan dengan Towuti dan terutama Wasuponda, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam aspek kualitas pelayanan, kecepatan respon, dan kepuasan masyarakat terhadap hasil layanan.

**2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

- o Untuk ketiga kecamatan, yaitu **Nuha**, **Towuti**, dan **Wasuponda**, nilai AKIP **belum dirilis** berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Triwulan II.

Dengan belum tersedianya data AKIP, evaluasi terhadap aspek akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan belum dapat dilakukan. Namun, hasil ini menunjukkan perlunya percepatan dalam proses pelaporan dan evaluasi agar capaian kinerja dapat dipantau secara lebih tepat waktu.

Secara umum, Kecamatan Nuha menunjukkan kinerja pelayanan publik yang baik dengan nilai IKM 81,95, meskipun masih tertinggal dibandingkan Towuti dan Wasuponda. Sementara itu, untuk indikator AKIP, seluruh kecamatan masih menunggu hasil resmi, sehingga analisis lebih lanjut akan dilakukan setelah data dirilis.

## **E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

### **Faktor Kegagalan / Hambatan**

#### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

- Program dan kegiatan yang bersifat objektif dan relevan serta korelatif terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- Peran aktif Kepala Seksi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran yang telah ditentukan.
- Sikap petugas dalam melakukan pelayanan semakin baik.

#### **2. Nilai AKIP**

- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang lebih baik. Dokumen seperti PK, Renja, dan LKjIP semakin terstruktur dan sesuai pedoman.

- Pendampingan dari Inspektorat/SKPD terkait Supervisi rutin membantu memperbaiki kelemahan dalam manajemen kinerja.
- Komitmen pimpinan dalam mengawal implementasi kinerja Arah dan kontrol pimpinan memastikan setiap kegiatan mengacu pada target kinerja.

## **Faktor Kegagalan / Hambatan**

### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

- Jumlah SDM belum sebanding dengan volume layanan Beban kerja tinggi tidak diimbangi personel yang cukup, mempengaruhi kecepatan pelayanan.
- Sarana prasarana pelayanan masih terbatas Fasilitas seperti ruang layanan dan perangkat IT belum memadai untuk mendukung kelancaran layanan.
- Kompetensi pegawai tidak merata Masih terdapat aparatur yang membutuhkan peningkatan keterampilan pelayanan publik.
- Pemanfaatan layanan digital belum optimal Masyarakat belum sepenuhnya paham atau terbiasa menggunakan layanan online sehingga terjadi antrian manual.

### **2. Nilai AKIP**

- Pemahaman aparat terhadap SAKIP belum merata Beberapa pegawai masih kesulitan dalam menyusun indikator, cascading, maupun pelaporan.
- Dokumentasi bukti dukung belum tertata baik Arsip kegiatan belum terdokumentasi dengan rapi sehingga mengurangi kualitas penilaian kinerja.
- Penyesuaian terhadap perubahan dokumen perencanaan strategis terbaru sering menuntut adaptasi yang tidak bisa dilakukan secara cepat.

## **Solusi Alternatif**

### **1. Untuk Meningkatkan IKM**

- Pelatihan layanan publik bagi aparatur  
Meningkatkan kemampuan komunikasi, keramahan, dan manajemen pelayanan.
- Optimalisasi layanan digital dan help desk  
Memperbaiki sistem online sekaligus menyediakan bantuan bagi masyarakat yang kesulitan.
- Penambahan fasilitas pelayanan dan infrastruktur IT  
Pembaruan perangkat, peningkatan jaringan, dan perbaikan ruang layanan untuk kenyamanan pengguna.
- Penguatan sistem reward & punishment  
Memberikan motivasi kepada pegawai berkinerja baik dan meningkatkan disiplin bagi yang belum memenuhi standar.
- Sosialisasi layanan kepada masyarakat  
Menyediakan informasi yang jelas mengenai alur dan persyaratan sehingga mengurangi kebingungan publik.

### **2. Untuk Meningkatkan Nilai AKIP**

- Pelatihan teknis SAKIP secara rutin  
Meningkatkan pemahaman aparatur terkait indikator, perencanaan, dan pelaporan.
- Digitalisasi pengelolaan dokumentasi  
Penyimpanan bukti dukung secara elektronik agar lebih rapi, mudah dicari, dan tidak hilang.
- Koordinasi lebih intens dengan Inspektorat dan SKPD terkait  
Mendapatkan masukan teknis untuk memastikan dokumen dan implementasi kinerja sesuai pedoman.

#### **F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi sumber daya pada tingkat kecamatan merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan wilayah dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia dan keuangan, serta infrastruktur. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kecamatan mampu memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan public

**1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha (S1)**

Berikut adalah gambaran efisiensi anggaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran I dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dan anggaran**

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	8.095.000	4.754.850	75%	2,433,700	75 %	51.2%
1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	8.095.000	4.754.850	75 %	2,433,700	75 %	51.2%
1.1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Dokumen	8.095,000	4.754.850	9 Dokumen	2,433,700	75 %	51.2%
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	297.275.450	279.571.950	91,66 %	60,349,450	91,66 %	21.6%
2.1.	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	97.275.450	79.571.950	87,50 %	37,609,450	87,50 %	47.3%
2.1.1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	4	17.807.850	16.030.050	4 Lembaga Kemasyarakatan	15,263,050	100 %	95.2%



NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
2.1.2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4	79.467.600	63.541.900	3 Laporan	22,346,400	75 %	35.2%
2.2.	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	200.000.000	200,000,000	100%	22,740,000	100%	11.4%
2.1.1.	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000	200.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	22,740,000	100 %	11.4%
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	16.079.500	13.080.850	75 %	6,720,850	75 %	51.4%
3.1.	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	11.889.700	9.525.400	75%	5,355,400	75 %	56.2%
3.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	7.724.150	6.774.900	3 Laporan	3,654,900	75 %	53.9%
3.1.2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4.165.550	2.750.500	3 Laporan	1,700,500	75 %	61.8%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
3.2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	4.189.800	3.555.450	75 %	1,365,450	75 %	38.4%
3.2.1.	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	4 Laporan	4.189.800	3.555.450	3 Laporan	1,365,450	75 %	38.4%
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	35.263.050	32.623.000	75 %	22,487,500	75 %	68.9%
4.1.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	35.263.050	32.623.000	75 %	22,487,500	75 %	68.9%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	35.263.050	32.623.000	9 Laporan	22,487,500	75%	68.9%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	10.333.200	8.211.350	75 %	-	75 %	0.0%
5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	10.333.200	8.211.350	75 %	-	75 %	0.0%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
5.1.1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Laporan	3.044.500	2.787.150	9 Laporan	-	75 %	0.0%
5.1.2.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	12 Laporan	7.288.700	5.424.200	9 Laporan	-	75%	0.0%

## Uraian Penjelasan Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja (Sasaran I)

Berdasarkan data capaian kinerja dan penggunaan anggaran pada berbagai program dan kegiatan di Kecamatan Nuha, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program menunjukkan tingkat **efisiensi sumber daya yang cukup baik**, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang perlu dioptimalkan agar efisiensi dan efektivitasnya meningkat. Berikut penjelasan per program:

### 1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program ini menunjukkan capaian kinerja sebesar **75%** dengan realisasi anggaran sebesar **51,2%** dari anggaran setelah efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan mampu mencapai tiga perempat target kinerja dengan penggunaan anggaran yang relatif hemat. Efisiensi ini menandakan adanya pengelolaan sumber daya yang baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar target kinerja dapat tercapai sepenuhnya.

### 2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program ini memiliki capaian kinerja **91,66%** dengan realisasi anggaran **21,6%** dari anggaran setelah efisiensi. Angka ini menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi, karena sebagian besar target kinerja telah tercapai dengan penggunaan anggaran yang relatif kecil.

- Pada kegiatan **Koordinasi Pemberdayaan Desa**, capaian kinerja **87,5%** dengan penggunaan anggaran **47,3%**, menunjukkan efisiensi yang baik.
- Kegiatan **Peningkatan Partisipasi Masyarakat** bahkan mencapai **100% kinerja** dengan **95,2% anggaran**, menandakan penggunaan sumber daya yang seimbang dan efektif.
- Sementara itu, **Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat** menunjukkan capaian **75%** dengan **35,2% anggaran**, yang berarti efisiensi cukup tinggi namun perlu peningkatan dalam pencapaian target.

- Untuk **Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan**, capaian **100%** dengan **11,4% anggaran** menunjukkan efisiensi yang sangat baik, karena seluruh target tercapai dengan biaya yang sangat rendah.
3. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**  
Program ini menunjukkan capaian kinerja **75%** dengan realisasi anggaran **51,4%**. Efisiensi tergolong baik karena lebih dari separuh target tercapai dengan penggunaan anggaran yang proporsional.
- Subkegiatan seperti **Sinergitas dengan TNI/Polri** dan **Harmonisasi dengan Tokoh Masyarakat** menunjukkan efisiensi yang cukup tinggi, dengan capaian kinerja **75%** dan penggunaan anggaran antara **53,9%–61,8%**.
  - Namun, kegiatan **Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah** masih menunjukkan efisiensi rendah (**38,4%**) yang menandakan perlunya optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**  
Program ini memiliki capaian kinerja **75%** dengan realisasi anggaran **68,9%**. Meskipun efisiensi anggaran tidak setinggi program lainnya, proporsi penggunaan anggaran masih tergolong wajar karena kegiatan ini bersifat rutin dan membutuhkan dukungan operasional yang lebih besar. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan memperkuat koordinasi dan perencanaan kegiatan agar hasil kinerja lebih maksimal.
5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**  
Program ini menunjukkan capaian kinerja **75%**, namun realisasi anggaran **0%**. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sebagian, tetapi belum terealisasi secara keuangan (mungkin karena proses administrasi atau penyerapan anggaran yang tertunda). Kondisi ini perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan kegiatan selaras dengan penyerapan anggaran, sehingga efisiensi dan akuntabilitas dapat terjaga.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Nuha menunjukkan **tingkat efisiensi sumber daya yang baik**, terutama pada program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Penggunaan anggaran yang relatif rendah dibanding capaian kinerja menunjukkan adanya pengelolaan sumber daya yang efektif. Namun, beberapa kegiatan masih perlu ditingkatkan dalam hal sinkronisasi antara capaian kinerja dan realisasi anggaran agar efisiensi dapat lebih optimal di seluruh bidang.

## 2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan

Berikut adalah gambaran efisiensi anggaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran II dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7****Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja dan Anggaran(S2)**

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI(Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	3,760,959,558	3,605,009,208	86,17%	2,233,721,481	86,17 %	62.0%
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	29,868,300	18,900,450	75%	11,470,450	75%	60.7%
I.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16,810,900	12,616,000	2 Dokumen	7,096,000	100 %	56.2%
I.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2,778,100	1,663,650	2 Dokumen	1,243,650	100%	74.8%
I.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,054,900	1,221,400	2 Dokumen	1,221,400	100%	100.0%
I.1.4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	8,224,400	3,399,400	6 Dokumen	1,909,400	60 %	56.2%
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,791,510,802	2,791,458,802	75 %	1,736,215,170	75 %	62.2%
I.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2,766,550,802	2,766,498,802	23 Orang	1,719,575,170	75%	62.2%
I.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	24,960,000	24,960,000	9 Lapor	16,640,000	75 %	66.7%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI(Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
	Triwulan/ Semesteran SKPD				an			
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	25,494,500	23,982,100	75 %	16,032,100	75 %	66.9%
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	25,494,500	23,982,100	3 Laporan	16,032,100	75 %	66.9%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	49,903,750	24,043,250	75 %	12,231,750	75 %	50.9%
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	19,838,750	14,876,250	9 Laporan	8,446,250	75 %	56.8%
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	7 Orang	30,065,000	9,167,000	5 Orang	3,785,500	71,42%	41.3%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	417,531,190	303,606,190	75%	240,261,560	75 %	79.1%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	7,433,000	7,433,000	9 Paket	5,307,200	75 %	71.4%
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	2 paket	6,597,500	6,597,500	2 paket	6,597,500	100%	100.0%
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Paket	9,531,040	9,531,040	15 Paket	6,595,760	75 %	69.2%



NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI(Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	21,349,650	19,858,650	5 Paket	11,575,000	75 %	58.3%
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	10,920,000	10,920,000	9 Dokumen	6,875,000	75 %	63.0%
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	164,700,000	138,450,000	9 Laporan	103,905,000	75 %	75.0%
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	197,000,000	110,816,000	9 Laporan	99,406,100	75 %	89.7%
1.6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	10,300,000	10,300,000	0	-	0	0.0%
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	10,300,000	10,300,000	0	-	0	0.0%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	362,331,016	358,698,416	75 %	196,373,380	75 %	54.7%
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	27,732,100	24,099,500	9 Laporan	5,385,080	75 %	22.3%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	34,598,916	34,598,916	9 Laporan	12,238,300	75%	35.4%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH EFISIENSI(Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	300,000,000	300,000,000	9 Laporan	178,750,000	75 %	59.6%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	100 %	74,020,000	74,020,000	79,69 %	21,137,071	79,69 %	28.6%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	39,900,000	39,900,000	9 Unit	4,429,571	75 %	11.1%
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	8,630,000	8,630,000	10 Unit	-	80%	0.0%
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	2 Unit	20,000,000	20,000,000	2 Unit	14,595,000	100%	73.0%
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	11 unit	5,490,000	5,490,000	1 Unit	2,112,500	9%	38.5%

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan upaya optimalisasi sumber daya melalui efisiensi anggaran yang signifikan di beberapa program dan subkegiatan. Dari total pagu awal sebesar **Rp3,760 miliar**, dilakukan penyesuaian melalui efisiensi menjadi **Rp3,605 miliar**, dan realisasi anggaran mencapai **Rp2,233 miliar** atau sekitar **62%** dari pagu setelah efisiensi. Tingkat efisiensi ini menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam mengarahkan sumber daya secara lebih terukur sesuai kebutuhan prioritas.

Secara umum, efisiensi paling nampak pada kegiatan yang bersifat administrasi, perencanaan, dan penyediaan dukungan operasional, di mana sebagian besar subkegiatan masih mampu mempertahankan capaian kinerja meskipun terjadi penyesuaian alokasi. Pada Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi, misalnya, terjadi pengurangan anggaran dari **Rp29,8 juta menjadi Rp18,9 juta**, namun seluruh penyusunan dokumen tetap tercapai 100%, bahkan beberapa subkegiatan menunjukkan kesesuaian realisasi anggaran yang efisien, seperti penyusunan RKA dan DPA yang mencapai 74,8% hingga 100% dari pagu setelah efisiensi.

Pada Administrasi Keuangan, alokasi setelah efisiensi sebesar **Rp2,791 miliar** direalisasikan sebesar **Rp1,736 miliar**, atau sekitar **62,2%**, tanpa mengganggu pemenuhan hak ASN dan pelaporan keuangan rutin, yang tetap berjalan sesuai ketentuan dengan tingkat capaian kinerja 75%.

Efisiensi yang cukup besar juga tampak pada Administrasi Umum, khususnya pada subkegiatan rapat koordinasi dan konsultasi, yang semula beranggaran Rp197 juta kemudian diefisiensikan menjadi Rp110 juta namun tetap mencapai capaian 75% dengan penggunaan anggaran yang sangat terkontrol (89,7%). Beberapa subkegiatan seperti penyediaan peralatan kantor dan bahan bacaan juga menunjukkan ketercapaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran berada pada kisaran 56–70%, menandakan efektivitas dalam pengadaan barang.

Adapun pada Pengadaan Barang Milik Daerah, terlihat efisiensi penuh dengan tidak digunakannya anggaran Rp10,3 juta karena tidak terdapat

realisasi kebutuhan pada triwulan ini. Demikian pula pemeliharaan aset menunjukkan variasi efisiensi, di mana beberapa subkegiatan seperti pemeliharaan sarana prasarana hanya terealisasi 38,5% meskipun eksekusi fisik kegiatan masih berjalan bertahap.

Secara keseluruhan, data triwulan III memperlihatkan bahwa sebagian besar kegiatan tetap terlaksana dengan kualitas kinerja yang memadai meskipun terjadi rasionalisasi anggaran. Efisiensi sumber daya ini menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam menjaga keberlanjutan layanan administrasi pemerintahan dengan penggunaan anggaran yang lebih proporsional, terukur, dan sesuai prioritas kebutuhan organisasi.

## **G. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Analisis program yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja merupakan langkah penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi sejauh mana program yang dijalankan berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendukung keberhasilannya. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk perbaikan strategi, peningkatan efisiensi, dan penguatan akuntabilitas kinerja di masa mendatang

### **➤ Analisis Program yang Menunjang Sasaran 1**

#### **1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

##### **- Sasaran Program:**

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

##### **- Indikator Sasaran Progra:**

Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

**- Target Kinerja : 100%**

**- Realisasi Kinerja : 75%**

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Program</b>	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Per Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{75}{100} \times 100$
	=	<b>75%</b>

- **Capaian kinerja : 75%**
- **Predikat Kinerja : tinggi**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang dijelaskan sebagai berikut:

-

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan

## 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- **Sasaran Program:**

Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan.

- **Target Kinerja : 100%**
- **Realisasi Kinerja : 91,66%**
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Program</b>	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{(87,50+100)/2}{100} \times 100$
	=	<b>91,66%</b>

- **Capaian kinerja : 91,66%**
- **Predikat Kinerja : tinggi**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung dengan 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan

### 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- **Sasaran Program:**

Meningkatnya Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 75%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Program</b>	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{((75+ 75) / 2)}{100} \times 100$
	=	<b>75%</b>

- **Capaian kinerja :** 75%.

- **Predikat Kinerja :** Tinggi.

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

### 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

- **Sasaran Program:**

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 75%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Program</b>	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{75}{100} \times 100$
	=	<b>75%</b>

- **Capaian kinerja** : 75%.
- **Predikat Kinerja** : **Tinggi** .

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

#### 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- **Sasaran Program:**

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku

- **Target Kinerja** : 100%.
- **Realisasi Kinerja**: 75%
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Program</b>	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{75}{100} \times 100$
	=	<b>75%</b>

- **Capaian kinerja** : 75%.
- **Predikat Kinerja** : **Tinggi**.

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan analisis

➤ **Analisis Program yang Menunjang Sasaran 2**

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.**

- **Sasaran Program:**

Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 86,17%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja Program</b>	$= \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	$= \frac{((75 + 75 + 75 + 75 + 100 + 75 + 79,69) / 7)}{100} \times 100$
	$= 86,17\%$

- **Capaian kinerja :** 86,17%.

- **Predikat Kinerja :** tinggi.

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 7 (Tujuh) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran Kecamatan Nuha Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan melalui APBD adalah sebesar **Rp 3.943.251.208,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.325.712.981,-** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **59%**. Gambaran realisasi anggaran Kantor Kecamatan Nuha Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.12.**

Realisasi Anggaran Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5= (4/3)*100
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,605,009,208	2,233,721,481	62.0%
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,900,450	11,470,450	60.7%
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,616,000	7,096,000	56.2%
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,663,650	1,243,650	74.8%
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,221,400	1,221,400	100.0%
I.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,399,400	1,909,400	56.2%
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,791,458,802	1,736,215,170	62.2%
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,766,498,802	1,719,575,170	62.2%
I.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24,960,000	16,640,000	66.7%
I.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23,982,100	16,032,100	66.9%
I.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23,982,100	16,032,100	66.9%
I.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,043,250	12,231,750	50.9%
I.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14,876,250	8,446,250	56.8%
I.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	9,167,000	3,785,500	41.3%
I.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303,606,190	240,261,560	79.1%
I.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,433,000	5,307,200	71.4%
I.5.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6,597,500	6,597,500	100.0%
I.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,531,040	6,595,760	69.2%
I.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,858,650	11,575,000	58.3%

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5= (4/3)*100
I.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,920,000	6,875,000	63.0%
I.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	138,450,000	103,905,000	75.0%
I.5.7	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	110,816,000	99,406,100	89.7%
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,300,000	-	0.0%
I.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,300,000	-	0.0%
I.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	358,698,416	196,373,380	54.7%
I.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24,099,500	5,385,080	22.3%
I.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	34,598,916	12,238,300	35.4%
I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300,000,000	178,750,000	59.6%
I.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74,020,000	21,137,071	28.6%
I.7.3	Pemeliharaan/rehabilitasi Bangunan Gedung/kantor	39,900,000	4,429,571	11.1%
I.7.4	Pemeliharaan sarana Dan Prasarana Gedung/kantor	8,630,000	-	0.0%
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.754.850	14,595,000	73.0%
II.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.754.850	2,112,500	38.5%
II.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.754.850	2,433,700	51.2%
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	279.571.950	2,433,700	51.2%
III.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.571.950	2,433,700	51.2%
III.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.030.050	60,349,450	21.6%

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5= (4/3)*100
III.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63.541.900	37,609,450	47.3%
III.2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200,000,000	15,263,050	95.2%
III.2.1	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	200.000.000	22,346,400	35.2%
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.080.850	22,740,000	11.4%
IV.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.525.400	22,740,000	11.4%
IV.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.774.900	6,720,850	51.4%
IV.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.750.500	5,355,400	56.2%
IV.2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.555.450	3,654,900	53.9%
IV.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.555.450	1,700,500	61.8%
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.623.000	1,365,450	38.4%
V.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.623.000	1,365,450	38.4%
V.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32.623.000	22,487,500	68.9%
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.211.350	22,487,500	68.9%
VI.1.	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.211.350	22,487,500	68.9%
VI.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.787.150	-	0.0%

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	$5 = (4/3) \times 100$
VI.1.2	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	5.424.200	-	0.0%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada Triwulan III Tahun 2025, Kecamatan Nuha telah melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pelaksanaan tersebut menunjukkan capaian kinerja yang secara umum berada pada jalur yang positif, baik dari aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, maupun efisiensi penggunaan anggaran. Berbagai upaya perbaikan dan penyesuaian strategi yang dilakukan sepanjang periode pelaporan turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan program.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, seperti keterbatasan sumber daya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta beberapa hambatan teknis di lapangan. Tantangan ini menjadi evaluasi penting bagi perangkat kecamatan dalam merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang lebih tepat sasaran pada triwulan berikutnya. Sinergi dan kolaborasi antarperangkat kecamatan, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat semakin diperkuat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan III ini, Kecamatan Nuha berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi berkelanjutan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2025. Melalui kerja sama dan dukungan semua pihak, Kecamatan Nuha optimis dapat menghadirkan kinerja pemerintahan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sorowako, Oktober 2025

Camat Nuha,



**ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom, M.Si.**

Pangkat : Pembina

NIP. 19810204 200902 1 001

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA

### KECAMATAN NUHA

#### TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom., M.Si

Jabatan : CAMAT NUHA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM.ST.IPM

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Nuha, 8 Juli 2025

Pihak Kedua,

Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM.ST.IPM

Pihak Pertama,

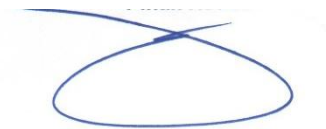
ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom., M.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN NUHA  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan public penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	81,5
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	66

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 3,605,009,208,-	APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.754.850,-	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Rp 279.571.950,-	APBD
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 13.080.850,-	APBD
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 32.623.000,-	APBD
6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 10.333.200,-	APBD

BUPATI LUWU TIMUR



Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM.ST.IPM

CAMAT NUHA



ARIEF FADILLAH AMIER,S.Kom.,M.Si





**Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan III Tanggal 06 Oktober 2025  
di Aula Kantor Camat Nuha**





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**KECAMATAN NUHA**

Alamat : Jln. Diponegoro No. 02 Sorowako 92984  
Email : kcn.lutimkab@gmail.com

Sorowako, 03 Oktober 2025

Nomor : 800.1/426.a/KCN  
Lampiran : -  
Hal : **Rapat Monitoring dan Evaluasi  
Triwulan III**

Yth. 1. Sekertaris Camat  
2. Kepala Seksi/Kasubag Kec.Nuha  
3. Staf Kec.Nuha  
di\_ Tempat

Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan **Monitoring dan Evaluasi  
Triwulan III Tahun 2025**, maka dengan ini kami mengundang  
Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

**Hari/Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025**  
**Pukul : 10.00 Wita-Selesai**  
**Tempat : Aula Kantor Camat Nuha**

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan banyak  
terima kasih.

CAMAT NUHA,



**ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom.M.Si**  
Pangkat: Pembina  
NIP. 19810204 200902 1 001

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Luwu Timur di Malili.

